EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.6, No.1, November 2026

Analisis Penyajian Laporan Keuangan Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Kodaeral VIII Manado

Natasya Eklesia Posumah[1], Susy Amelia Marentek[2], Fanesa Isalia Minanda Syaefudin[3]
[1,2,3]Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado, Manado, Indonesia
E-mail: tasyaposumah02@gmail.com [1], marenteksusy@gmail.com[2] , fanesa.Syaefudin@polimdo.ac.id[3]

Article History:
Received: 03 Juli 2026
Revised: 01 Oktober 2026
Accepted: 18 Oktober 2026

Kata Kunci : *Laporan Keuangan, SAPP, Transparansi, Akuntabilitas.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengevaluasi tentang bagaimana penyajian laporan keuangan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada Kodaeral VIII Manado. Penyajian informasi keuangan terutama melalui laporan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan pada setiap perusahaan, organisasi, maupun instansi pemerintahan. Dalam penyajian laporan keuangan tentu diperlukan transparansi dan akuntabilitas untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang relevan dan akurat yang sesuai dengan prinsip sistem akuntansi pemerintah pusat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data juga dilakukan dan diperoleh melalui wawancara dengan staff terkait, observasi secara langsung terhadap aktivitas penyajian laporan keuangan, dan dokumentasi terhadap dokumen-dokumen pendukung. Teknik analisis data melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Kodaeral VIII Manado ditemukan bahwa penyajian laporan keuangan yang disajikan sudah transparan dan akuntabel, yang berarti . Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan dalam penyajian laporan keuangan, seperti keterbatasan akses informasi, keterlambatan pelaporan, serta penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat.*

PENDAHULUAN

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan organisasi, khususnya pada instansi pemerintah dan militer, karena berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang disusun secara baik akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan serta kinerja suatu instansi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan public (Miftahudin and Sisdianto 2024).

Transparansi dalam laporan keuangan berarti keterbukaan dalam penyampaian informasi

yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang membutuhkan. Prinsip ini menjadi sangat penting karena masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan dana publik sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi (Dinda et al. 2026). Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi faktor utama dalam penyajian laporan keuangan. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban suatu entitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya secara jujur dan professional (Dinda et al. 2026).

Kodaeral VIII Manado sebagai salah satu satuan kerja pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel guna mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam penyajian laporan keuangan yang berkaitan dengan kualitas informasi dan keterbukaan kepada publik, sehingga diperlukan analisis mendalam terhadap sistem penyajiannya.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan dalam penyajian laporan keuangan, seperti keterbatasan akses informasi, keterlambatan pelaporan, serta penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan informasi yang disajikan kurang optimal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas (Dinda et al. 2026). Permasalahan dalam penyajian laporan keuangan yang belum optimal dapat menimbulkan berbagai dampak serius, baik bagi organisasi maupun bagi kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah seperti Kodaeral VIII Manado, karena kualitas informasi keuangan yang rendah akan menghambat proses pengambilan keputusan dan pengawasan.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan terbukti berdampak langsung pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, yang pada akhirnya dapat mengganggu legitimasi dan kinerja organisasi secara keseluruhan (Masitha and Zulfikar Mulyadi 2024). Dampak lainnya adalah tidak optimalnya sistem pengendalian internal yang menyebabkan akuntabilitas tidak berjalan secara efektif, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaporan bahkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (Alviano and Ayudiyati 2024) .

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penyajian laporan keuangan, diperlukan suatu upaya sistematis melalui penelitian yang mampu menganalisis secara mendalam proses penyajian laporan keuangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pada Kodaeral VIII Manado. Penelitian mengenai analisis penyajian laporan keuangan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada Kodaeral VIII Manado menjadi penting untuk dilakukan karena laporan keuangan yang berkualitas merupakan dasar utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan akurat dalam suatu instansi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sehingga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan suatu organisasi (Larasati Putri Hardani1, Atik Andhayani2 2025) .Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang baik mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta membangun kepercayaan pemangku kepentingan terhadap organisasi (Miftahudin and Sisdianto 2024). Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta rekomendasi yang relevan dalam meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pada Kodaeral VIII Manado.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian mengenai analisis penyajian laporan keuangan

dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada Kodaeral VIII Manado menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi penyajian laporan keuangan yang ada saat ini, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas secara optimal.

LANDASAN TEORI

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

Pemerintah menerapkan akuntasi sektor publik sebagai rangkaian proses pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat yang tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Agar informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Secara sederhana Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah 34 serangkaian prosedur manual ataupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat (Jacqualine Greety Wenas, 2021).

Dari perspektif hukum, pelaksanaan SAPP berlandaskan pada peraturan yang kokoh untuk memastikan adanya pengelolaan keuangan yang jelas dan terbuka. Undang-Undang yang menjadi dasar utama sistem ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, yang mewajibkan setiap kepala kementerian atau lembaga untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Kemudian, aspek teknis dari pelaporan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menjadi pedoman utama dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia.

Ruang lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) meliputi seluruh proses pertanggungjawaban anggaran pemerintah pusat yang terdiri atas dua komponen utama yang saling terhubung, yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk mencatat transaksi pengelolaan kas, utang, investasi, serta transfer ke daerah, dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dijalankan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga termasuk Kodaeral VIII Manado untuk mencatat realisasi anggaran serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), sehingga keterpaduan keduanya menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang lebih akurat dan menyeluruh.

Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat

Laporan keuangan sektor publik, khususnya pada instansi pemerintah termasuk lingkungan TNI, terdiri dari beberapa komponen utama yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Setiap komponen laporan memiliki fungsi dan tujuan masing-masing dalam menyajikan informasi keuangan secara menyeluruh dan terintegrasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Utami and Berliani 2024). Tujuan utama laporan keuangan pemerintah adalah menyediakan informasi keuangan yang transparan, akuntabel dan relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas serta hasil operasi entitas pelaporan.

Komponen laporan keuangan satuan kerja meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menggambarkan ringkasan sumber, alokasi, dan penggunaan anggaran berbasis kas seperti

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam satu periode pelaporan. Neraca yang menunjukkan kondisi posisi keuangan entitas berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan Operasional (LO) yang menyajikan informasi pendapatan, beban, serta hasil surplus atau defisit operasional berbasis akrual dengan perbandingan antara periode berjalan dan sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang menjelaskan perubahan nilai ekuitas melalui ekuitas awal, penyesuaian, surplus/defisit LO, hingga ekuitas akhir serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang memuat penjelasan terperinci, analisis, dan pengungkapan tambahan atas setiap pos laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan guna mendukung penyajian laporan yang andal dan transparan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyediakan kerangka kerja untuk memastikan laporan keuangan disusun secara relevan. . Penyajian laporan keuangan yang relevan sesuai SAP memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi masalah anggaran, mengevaluasi efektivitas program, dan merencanakan penggunaan sumber daya secara optimal (Sofyani 2025).

1. **Relevan**
   Informasi yang disajikan harus dapat memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan pengguna, serta membantu dalam menilai peristiwa yang terjadi di masa lalu maupun kondisi saat ini
2. **Andal**
   Informasi harus disajikan secara jujur sesuai fakta, tidak mengandung kesalahan material, dan tidak menyesatkan pengguna laporan.
3. **Dapat Dibandingkan**
   Laporan keuangan harus memungkinkan perbandingan, baik antar periode dalam satu entitas maupun dengan entitas pemerintah lainnya untuk melihat perkembangan kinerja keuangan.
4. **Dapat Dipahami**
   Informasi harus disusun dengan cara yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan COSO

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Setyaningsih, Nusa Perdana, and Khairunnisa 2024). Dalam PP No.60 Tahun 2008, proses yang mencakup rangkaian aktivitas berkelanjutan yang dilaksanakan pimpinan serta semua karyawan untuk membangunkan kepercayaan atas tercapainya tujuan organisasi dengan operasi yang efektif dan efisien, kepercayaan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan pada peraturan UUD (Utami and Berliani 2024).

Dalam praktiknya, SPIP berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional organisasi, menjaga keandalan pelaporan keuangan, mengamankan aset negara, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Harwanto 2024). Selain itu, SPIP juga terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima komponen tersebut saling terintegrasi dan bekerja secara sinergis untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan (Larasati Putri Hardani1, Atik Andhayani2 2025).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Indonesia mengadopsi kerangka kerja *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* atau COSO sebagai dasar dalam penyusunan dan implementasi pengendalian intern. Kerangka kerja ini digunakan secara luas karena mampu memberikan pendekatan yang sistematis dalam memastikan efektivitas pengendalian, manajemen risiko, serta peningkatan akuntabilitas dalam organisasi sektor public (Handayani, Gamayuni, and Alvia 2023). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengadopsi kerangka kerja COSO yang terdiri dari lima elemen utama sebagai berikut:

1. **Lingkungan Pengendalian *(Control Environment)***
   Lingkungan pengendalian merupakan dasar pengendalian intern yang mencerminkan sikap pimpinan dan pegawai terhadap pentingnya pengendalian, serta membentuk budaya integritas, etika, dan disiplin dalam organisasi (Setyaningsih, Nusa Perdana, and Khairunnisa 2024).
2. **Penilaian Risiko *(Risk Assessment)***
   Penilaian risiko adalah proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, seperti kesalahan pencatatan, penyimpangan anggaran, dan ketidaksesuaian regulasi (SUGIYONO, Miqdad, and Sulistiyo 2021)
3. **Aktivitas Pengendalian *(Control Activities)***
   Aktivitas pengendalian mencakup kebijakan dan prosedur untuk memastikan kegiatan berjalan efektif, seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan pengawasan pelaksanaan (Harwanto 2024).
4. **Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication)***
   Komponen ini berkaitan dengan penyediaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu guna mendukung transparansi serta pengambilan keputusan organisasi (Larasati Putri Hardani1, Atik Andhayani2 2025).
5. **Pemantauan (*Monitoring Activities)***
   Pemantauan adalah evaluasi berkelanjutan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian intern melalui pengawasan rutin dan audit internal agar sesuai ketentuan (Handayani, Gamayuni, and Alvia 2023).

Table 1 Matriks Kerangka Kerja COSO dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Komponen COSO	Fokus Implementasi di Kodaeral VIII Manado	Kontribusi Terhadap Transparansi	Kontribusi Terhadap Akuntabilitas
Lingkungan Pengendalian	Mambangun komitmen komandan dan staf keuangan terhadap integritas, kode etik TNI dan disiplin dalam pelaporan.	Menciptakan keterbukaan sikap pimpinan dalam menyajikan data keuangan apa adanya.	Menjamin bahwa setiap personil bertanggung jawab atas kejujuran data yang diinput.
Penilian Resiko	Identifikasi potensi kesalahan input di aplikasi SAKTI, keterlambatan rekonsiliasi atau	Memastikan semua area yang rawan penyimpangan tetap terungkap dan terinformasi dalam	Memitigasi resiko temuan audit dari BPK/Irjenal sehingga laporan keuangan tetap valid.

	resiko selisih stok barang milik negara (BMN).	CaLK.	
Aktivitas Pengenalian	Adanya pemisahan tugas antara operator SAKTI, verifikator dan pejabat penandatangan SPM serta otorisasi berjenjang.	Mencegah adanya informasi sepihak atau manipulasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.	Memastikan setiap pengeluaran anggaran sesuai dengan prosedur dan aturan hokum yang berlaku.
Infromasi & Komunikasi	Pemanfaatan sistem informasi yang akurasi dan penyampaian laporan rutin ke jenjang komando atasan (Mabesal) secara tepat waktu.	Menjamin penyampaian informasi keuangan yang relevan dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang.	Menjadi sarana pertanggungjawaban kepada pimpinan dan public melalui pelaporan yang standar.
Pemantauan (Monitoring)	Evaluasi berkala oleh Irjenal (Inspektorat) dan audit internal terhadap kepatuhan penyajian laporan keuangan	Memastikan bahwa keterbukaan informasi dilakukan secara konsisten bukan hanya audit.	Menilai efektivitas system pengendalian intern secara berkelanjutan agar kinerja keuangan tetap terjaga.

Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, terbuka, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi menuntut adanya keterbukaan dalam penyampaian informasi, sehingga masyarakat maupun pemangku kepentingan dapat mengetahui dan menilai kinerja organisasi secara objektif (Setyaningsih, Nusa Perdana, and Khairunnisa 2024).

Transparansi dalam pelaporan keuangan sektor publik dapat diukur melalui beberapa indikator utama yang menjamin bahwa informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Adapun kriteria laporan keuangan yang dianggap transparan adalah sebagai berikut :

1. **Informasi yang Tepat Waktu**
   Laporan keuangan perlu disajikan sesuai jadwal agar tetap relevan bagi pimpinan maupun auditor dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus mencerminkan tingkat kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran.
2. **Aksesibilitas**
   Aksesibilitas menggambarkan kemudahan pihak berwenang dalam mengakses data keuangan tanpa kendala berarti, sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan optimal dan risiko penyimpangan dapat ditekan.
3. **Kejelasan Informasi**

Penyusunan laporan keuangan harus mengikuti standar yang berlaku secara sistematis dengan penggunaan istilah akuntansi yang tepat, sehingga mudah dipahami serta memungkinkan perbandingan antarperiode maupun antarentitas.

4. **Pengungkapan yang Memadai**

   Transparansi tercermin dari penyajian informasi yang lengkap, khususnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang menjelaskan secara rinci angka-angka serta kebijakan akuntansi yang digunakan.

Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pengelola organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atas seluruh pelaksanaan kegiatan, baik yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks sektor publik, akuntabilitas menjadi prinsip penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Setyaningsih, Nusa Perdana, and Khairunnisa 2024).

Menurut teori akuntabilitas sektor public, akuntabilitas tidak bersifat tunggal melainkan terdiri dari beberapa dimensi yang saling berkaitan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara bertanggung jawab. Dalam konteks satuan kerja seperti Kodaeral VIII Manado, dimensi akuntabilitas tersebut meliputi:

1. **Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum**

   Dimensi ini menekankan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip etika dalam pengelolaan anggaran untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menjaga integritas laporan keuangan.
2. **Akuntabilitas Proses**

   Berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP) serta pemanfaatan sistem yang telah ditetapkan, seperti SAKTI, agar proses pelaporan keuangan berlangsung secara terstruktur dan minim kesalahan material.
3. **Akuntabilitas Program**

   Menggambarkan sejauh mana penggunaan anggaran mampu mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan serta memberikan kontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas organisasi.
4. **Akuntabilitas Finansial**

   Mengharuskan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena secara sistematis berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini menghasilkan gambaran yang faktual dan mendalam mengenai objek penelitian, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data.

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di Kodaeral VIII Manado, yaitu Kepala Akuntansi, Bendahara Pengeluaran, dan Operator SAKTI. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta peraturan dan literatur yang relevan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berbagai jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses pengelolaan keuangan di Kodaeral VIII Manado, wawancara mendalam (in-depth interview) kepada informan yang relevan guna memperoleh informasi terkait implementasi kebijakan serta tingkat transparansi laporan keuangan, serta dokumentasi melalui pengumpulan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan berbagai dokumen pendukung seperti bukti transaksi dan hasil pemeriksaan audit yang digunakan untuk mendukung analisis penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yang dilaksanakan secara terstruktur melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi laporan keuangan Kodaeral VIII Manado, kemudian diseleksi dan difokuskan pada informasi yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel untuk mengidentifikasi pola temuan, sebelum akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan guna menilai efektivitas penyajian laporan keuangan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas organisasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komando Daerah TNI Angkatan Laut VIII Manado (Kodaeral VIII) merupakan satuan komando kewilayahan TNI AL yang bertugas melaksanakan pembinaan kekuatan dan dukungan operasi pertahanan laut di wilayah kerjanya, khususnya di kawasan Indonesia bagian timur yang mencakup Sulawesi Utara dan sekitarnya. Kodaeral VIII Manado berperan dalam menjaga keamanan wilayah perairan, mendukung operasi militer selain perang, serta melaksanakan fungsi pembinaan potensi maritim. Dalam konteks penelitian ini, Kodaeral VIII Manado dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan instansi pemerintah yang mengelola keuangan negara sehingga relevan untuk mengkaji penyajian laporan keuangan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Analisis Penyajian Laporan Keuangan pada Kodaeral VIII Manado

Analisis penyajian laporan keuangan merupakan suatu proses penilaian untuk memastikan bahwa penyusunan serta penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan akuntansi yang berlaku. Di Kodaeral VIII Manado, analisis ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir laporan, tetapi juga mencakup seluruh proses mulai dari pencatatan transaksi, pemeriksaan dokumen, rekonsiliasi data, hingga tahap penyusunan laporan keuangan. Proses tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami, sehingga dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, serta proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan di Kodaeral VIII Manado telah dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam proses tersebut, setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi, di mana Bendahara Pengeluaran bertugas mencatat transaksi serta memastikan kelengkapan dokumen, Kepala Akuntansi melakukan pengawasan dan memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku, sedangkan Operator SAKTI mengelola data keuangan melalui sistem aplikasi SAKTI. Kolaborasi antarperan tersebut menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, laporan keuangan Kodaeral VIII Manado telah memenuhi karakteristik kualitatif SAP, yakni relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan pemahaman. Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) turut memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, ketelitian, dan transparansi pengelolaan data keuangan serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Dengan demikian, penerapan prosedur dan sistem yang ada berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan serta penguatan transparansi dan akuntabilitas instansi.

Table 2 Indikator Penyajian Laporan Keuangan

Aspek Yang Dianalisis	Hasil Wawancara	Kondisi di Kodaeral VIII Manado
Pencatat transaksi	Dilakukan berdasarkan bukti transaksi yang sah	Sudah terlaksana dengan baik
Verifikasi data	Data diperiksa sebelum dilaporkan	Sudah diterapkan
Rekonsiliasi data	Dilakukan sebelum penyusunan laporan	Berjalan secara rutin
Kepatuhan terhadap SAP	Penyajian laporan mengikuti SAP	Sesuai ketentuan
Pemanfaatan teknologi	Menggunakan SAKTI	Mendukung penyusunan laporan keuangan

Peran Penyajian Laporan Keuangan dalam Meningkatkan Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam *good governance* yang menekankan keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan publik. Di Kodaeral VIII Manado, transparansi diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan yang disusun secara lengkap, akurat, jelas, dan tepat waktu, sehingga mampu menggambarkan realisasi anggaran, penggunaan dana, serta kondisi keuangan satuan kerja. Laporan keuangan tersebut berfungsi sebagai sarana informasi bagi pimpinan dan pihak pengawas dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan pada Kodaeral VIII Manado telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Informasi yang dihasilkan memungkinkan pimpinan untuk melakukan pemantauan terhadap kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan perencanaan serta ketentuan yang berlaku. Berdasarkan keterangan dari Kepala Akuntansi, laporan keuangan juga menjadi media utama dalam menyampaikan kondisi keuangan satuan kerja, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kinerja dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Selain itu, transparansi pengelolaan keuangan juga didukung oleh penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang mengintegrasikan proses pencatatan dan pengolahan data keuangan. Sistem ini mempermudah penelusuran transaksi, meningkatkan ketelitian data, serta mempercepat proses pemeriksaan oleh pihak pengawas. Informasi dari Operator SAKTI menunjukkan bahwa kemudahan akses dan validasi data dalam sistem tersebut turut memperkuat fungsi pengawasan, menekan potensi kesalahan, serta meningkatkan keterbukaan informasi. Dengan demikian, pemanfaatan SAKTI dalam penyusunan laporan keuangan berperan penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kodaeral VIII Manado.

Table 3 Indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan

Indikator Transparansi	Temuan Penelitian	Keterangan
Ketersediaan informasi keuangan	Tersedia melalui laporan keuangan	Terpenuhi
Kejelasan informasi	Informasi disajiakan secara sistematis	Terpenuhi
Ketepatan waktu pelaporan	Laporan disampaikan secara periodic	Cukup baik
Kemudahan akses informasi	Dapat diakses oleh yang berwenang	Terpenuhi
Dukungan sistem informasi	Menggunakan SAKTI	Sangat membantu

Peran Penyajian Laporan Keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada pihak yang berwenang. Di Kodaeral VIII Manado, akuntabilitas terlihat dari penyajian laporan keuangan yang disusun secara lengkap, akurat, relevan, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban atas penggunaan dana APBN dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan di Kodaeral VIII Manado mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui proses penyusunan yang sistematis dan didukung oleh kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yang sah. Setiap transaksi keuangan wajib dilengkapi dengan bukti pendukung seperti kuitansi, faktur, dan surat perintah membayar yang telah diverifikasi sebelum dicatat dan dilaporkan. Selain itu, penerapan pengawasan baik secara internal maupun eksternal memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, informasi dari Kepala Akuntansi dan Bendahara Pengeluaran menunjukkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas memiliki peran penting dalam menilai efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran, sekaligus menjadi dasar dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Penyajian informasi keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan instansi. Dengan demikian, akuntabilitas di Kodaeral VIII Manado tercermin melalui sistem pelaporan yang tertib, pengawasan yang berkesinambungan, serta

ketersediaan informasi keuangan yang transparan dan kredibel.

Table 4 Indikator Amuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Indikator Akuntabiitas	Temuan Penelitian	Keterangan
Petanggung jawaban anggaran	Dilakukan melalui laporan keuangan	Terpenuhi
Kelengkapan dokumen	Setiap transaksi memiliki bukti pendukung	Terpenuhi
Pengawasan Internal	Dilaksankan secara berkala	Terpenuhi
Pemeriksaan eksternal	Terdapat audit/pemeriksaan	Terpenuhi
Kepatuhan terhadap aturan	Mengacu pada ketentuan yang berlaku	Terpenuhi

Kendala dan Upaya Perbaikan

Hasil analisis menunjukkan bahwa proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Kodaeral VIII Manado secara umum telah berjalan dengan baik serta telah mengikuti ketentuan dan prosedur pengelolaan keuangan pemerintah yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala yang berpotensi memengaruhi efektivitas proses serta kualitas informasi yang dihasilkan. Kendala tersebut berasal dari berbagai faktor, mulai dari aspek administrasi, teknis operasional, hingga kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah diterapkan, masih diperlukan peningkatan pada beberapa aspek agar kualitas laporan keuangan dapat lebih optimal.

Salah satu permasalahan yang cukup menonjol adalah keterlambatan dalam penyampaian dokumen pertanggungjawaban serta adanya kesalahan pada proses penginputan data. Keterlambatan tersebut dapat menghambat tahapan verifikasi, rekonsiliasi, dan pengolahan data keuangan, sedangkan kesalahan input yang dipicu oleh kurangnya ketelitian, tingginya volume transaksi, serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun dan kode anggaran dapat menyebabkan ketidaksesuaian informasi dalam laporan keuangan. Di samping itu, penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) juga masih menghadapi beberapa kendala teknis, seperti gangguan sistem, pemeliharaan server, keterbatasan jaringan internet, serta lambatnya akses aplikasi pada periode pelaporan, yang turut berdampak pada keterlambatan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan.

Table 5 Peran Aplikasi SAKTI dalam Penyajian Laporan Keuangan

Fungsi SAKTI	Manfaat yang Dirasakan
Input data transaksi	Mempercepat pencatatan
Pengolahan data keuangan	Mengurangi kesalahan perhitungan
Penyusunan laporan	Mempercepat Penyajian laporan
Penyimpanan data	Data leboh terorganisasi
Monitoring transaksi	Memudahkan pengawasan

Sebagai upaya mengatasi berbagai kendala tersebut, Kodaeral VIII Manado telah melakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain dengan meningkatkan koordinasi antarbagian, menetapkan batas waktu yang lebih tegas dalam penyampaian dokumen pertanggungjawaban, serta memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada para pengguna aplikasi SAKTI. Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal juga terus ditingkatkan melalui proses verifikasi, rekonsiliasi, dan pemeriksaan data keuangan secara berkala untuk memastikan ketepatan pencatatan transaksi. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan hambatan yang ada dapat diminimalkan sehingga kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik, akurat, tepat waktu, andal, serta mampu mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Kodaeral VIII Manado.

Table 6 Kendala dan Upaya Perbaikan

Kendala	Dampak	Upaya Perbaikan
Keterlambatan dokumen pertanggungjawaban	Penyusunan laporan terlambat	Meningkatkan koordinasi antarbagian
Kesalahan input data	Menurunkan akurasi laporan	Verifikasi dan pengecekan ulang
Gangguan aplikasi SAKTI	Menghambat proses pelaporan	Pemeliharaan system secara berkala
Keterbatan SDM	Memengaruhi efektivitas pekerjaan	Pelatihan dan bimbingan teknis

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan pada Kodaeral VIII Manado telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku. Proses penyusunannya dilakukan secara sistematis melalui tahapan pencatatan, verifikasi, rekonsiliasi, serta pemanfaatan aplikasi SAKTI, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Selain itu, penyajian laporan keuangan juga mendukung peningkatan transparansi melalui penyediaan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu bagi pihak yang berkepentingan.

Dari sisi akuntabilitas, laporan keuangan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran negara yang didukung oleh kelengkapan dokumen, proses verifikasi, serta mekanisme pengawasan yang berkesinambungan. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan penyampaian dokumen, kesalahan penginputan data, gangguan pada aplikasi SAKTI, dan keterbatasan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, Kodaeral VIII Manado disarankan untuk terus meningkatkan koordinasi antarbagian, memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian pada instansi pemerintah lainnya atau menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode campuran (mixed methods) sehingga dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan sektor publik.

DAFTAR REFERENSI

Alviano, Irenius, and Citra Ayudiyati. 2024. "Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi Melalui Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023." *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4(1): 2636–44.

Dinda, Anisa, Pertiwi Clarita, Joyce Sitanggang, Putri Uli, Sitompul Putri, and Kemala Sari. 2026. "Analisis Transparansi Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Dan Daerah." 4(1): 184–92.

Handayani, Febrina, Rindu Gamayuni, and Liza Alvia. 2023. "The Impact of Implementing E-Government, System for Government Internal Control (SPIP) , Capability of the Government's Internal Control Apparatus (KAPIP) on Corruption Prevention in Indonesian Provincial Governments for the Years 2021–2022." 3(2014). doi:10.4108/eai.13-9-2023.2341130.

Harwanto, Harwanto. 2024. "Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Banjarmasin Tahun 2020." *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan* 6(1): 49. doi:10.20527/jpp.v6i1.9336.

Jacqualine Greety Wenas. (2021). Akuntansi Sektor Publik Dan Praktek. Poimdo Press.

Larasati Putri Hardani1, Atik Andhayani2, Indrayati3. 2025. "Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah Di Kota Malang Publik Melalui Berbagai Regulasi , Termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan."

Masitha, Zainab, and Dwi Zulfikar Mulyadi. 2024. "Transparansi Keuangan Daerah: Studi Kualitatif Tentang Pengelolaan Anggaran Di Sulawesi Tenggara." *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)* 5(2): 225–35. https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJMA/article/view/4373.

Miftahudin, Aris, and Ersi Sisdianto. 2024. "Analisis Kualitas Laporan Keuangan Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Perusahaan." *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1(1): 7424–31.

Setyaningsih, Ratna, Petrolis Nusa Perdana, and Hera Khairunnisa. 2024. "Analisis Pengendalian Internal Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cilacap." *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* 4(2): 540–75. doi:10.21009/japa.0402.13.

Sofyani, Hafiez. 2025. "Memperkenalkan New Public Governance Dalam Akuntansi Sektor Publik Indonesia : Refleksi Konseptual Melalui Ilustrasi Program Makan Bergizi." 9(3). doi:10.18196/rabin.v9i3.30223.

SUGIYONO, SUKMA ULI NUHA, Muhammad Miqdad Miqdad, and Agung Budi Sulistiyo Sulistiyo. 2021. "Implementation Internal Control System Government With Government Regulation Release of No. 60/2008 in Kpu Jember Regency: A Phenomenology Approach." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 6(2): 1091–1107. doi:10.20473/jraba.v6i2.132.

Utami, Rachma Hida Silfa, and Kartika Berliani. 2024. "Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Jurnal Maneksi* 13(2): 265–73. doi:10.31959/jm.v13i2.2200.